

Defisit Anggaran dalam Manajemen Keuangan Daerah dan Kebijakan APBD

Forum Bintek
DPRD Kabupaten Deli Serdang
Hotel Ibis Malioboro, Jogja
14 Mar 2013

Wahyudi Kumorotomo, PhD
www.kumoro.staff.ugm.ac.id
kumoro@ugm.ac.id



Jurusan Manajemen dan
Kebijakan Publik
FISIPOL UGM

MASALAH UMUM

EFEKTIVITAS ANGGARAN PUBLIK

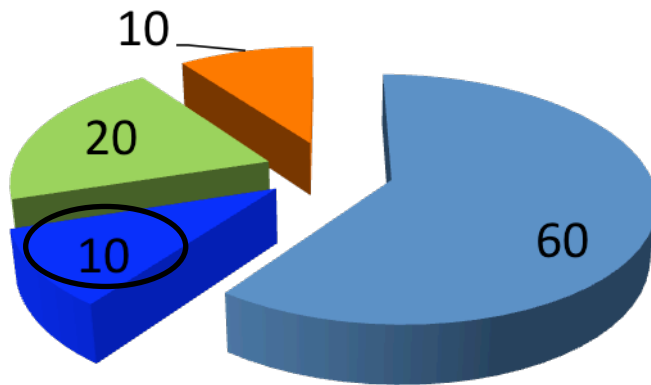
1. Ekonomi tumbuh (prediksi th 2013: 6,4%) tetapi bukan karena dukungan anggaran pemerintah.
2. Peran anggaran dlm pertumbuhan PDB hanya 8,9% (Radhi, 2012). Bgm peran APBD?
3. Kebutuhan anggaran (*fiscal need*) dan kapasitas anggaran (*fiscal capacity*) tidak seimbang
4. Sebagian besar anggaran publik tersedot untuk biaya operasional birokrasi (gaji, belanja rutin)
5. Daya serap anggaran turun, sisa anggaran tidak dapat dipergunakan, akuntabilitas anggaran rendah
6. Prioritas pembangunan daerah belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll).

Rujukan Peraturan ttg Anggaran

1. UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara
2. UU No.32/2004 ttg Sistem Pemerintahan Daerah
3. UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah
4. UU No.28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. PP No.23/2003 ttg Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
6. PP No.58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PP No.30/2011 ttg Pinjaman Daerah
8. Permendagri No.21/2011 ttg Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Permenkeu No.137/PMK.07/2012 ttg Batas Maksimal Defisit dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah

Dari APBN ke APBD

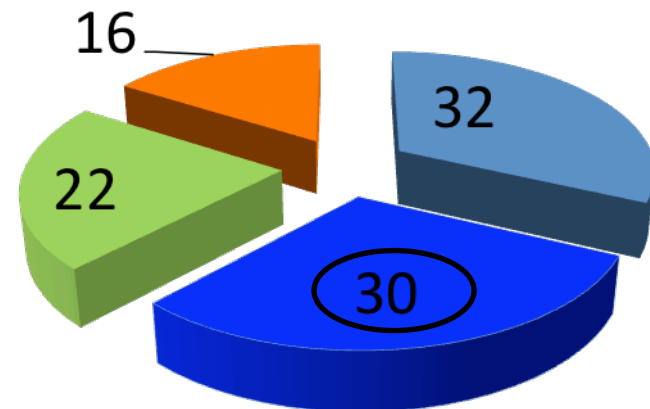
Desentralisasi Fiskal telah mengalihkan sebagian sumber dana publik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Apakah ini sudah efektif?



■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

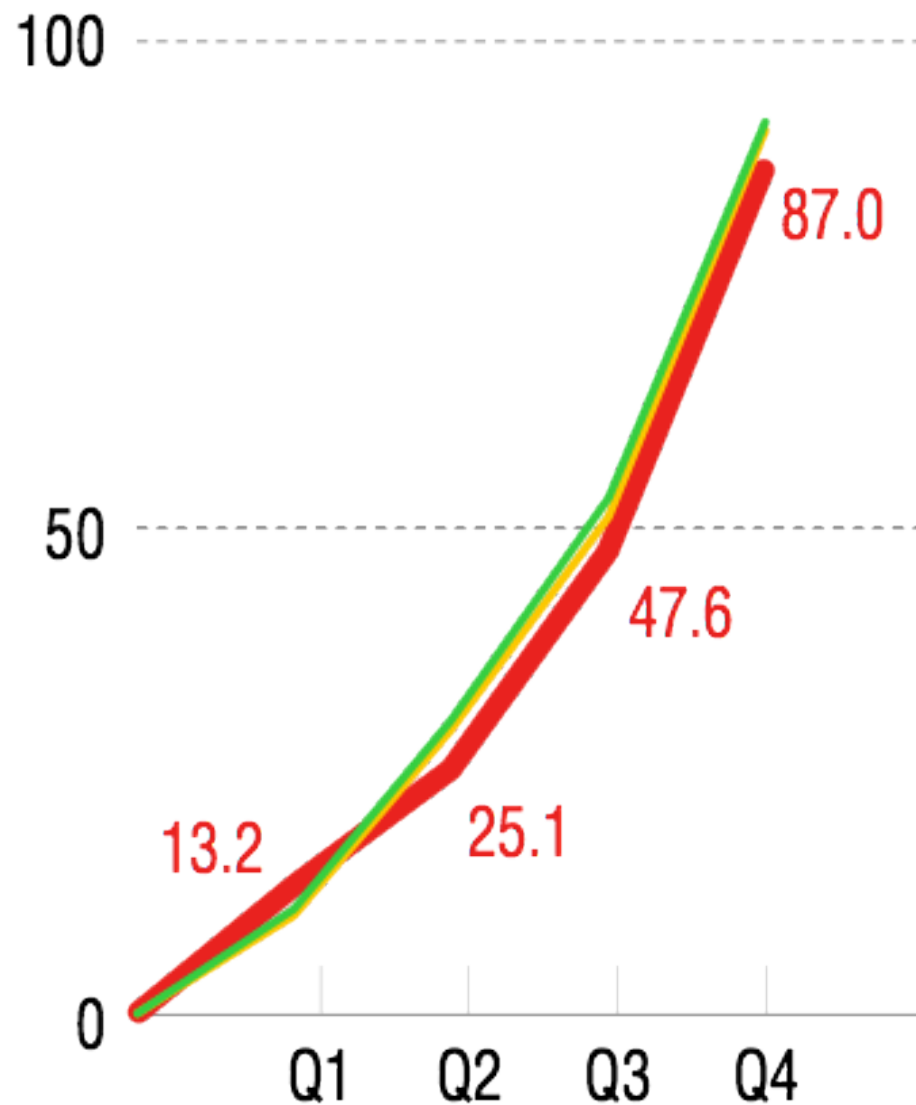
2000

2010



■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

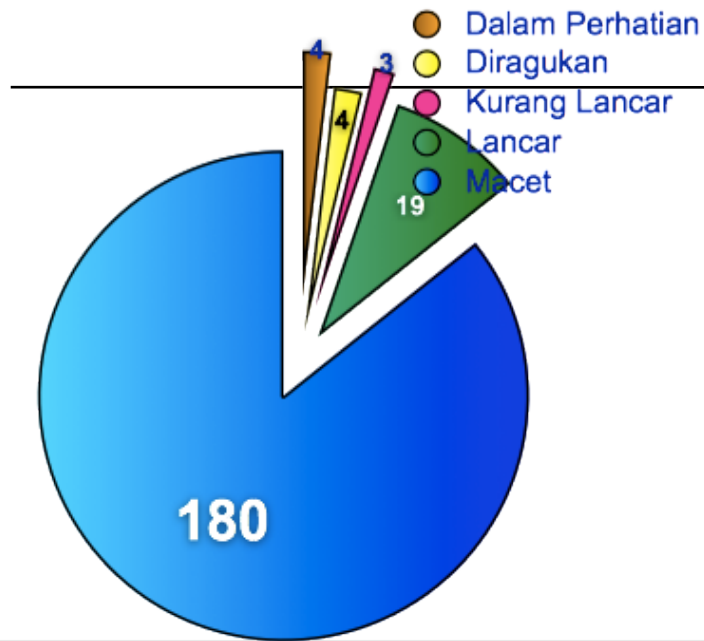
Serapan anggaran 2011



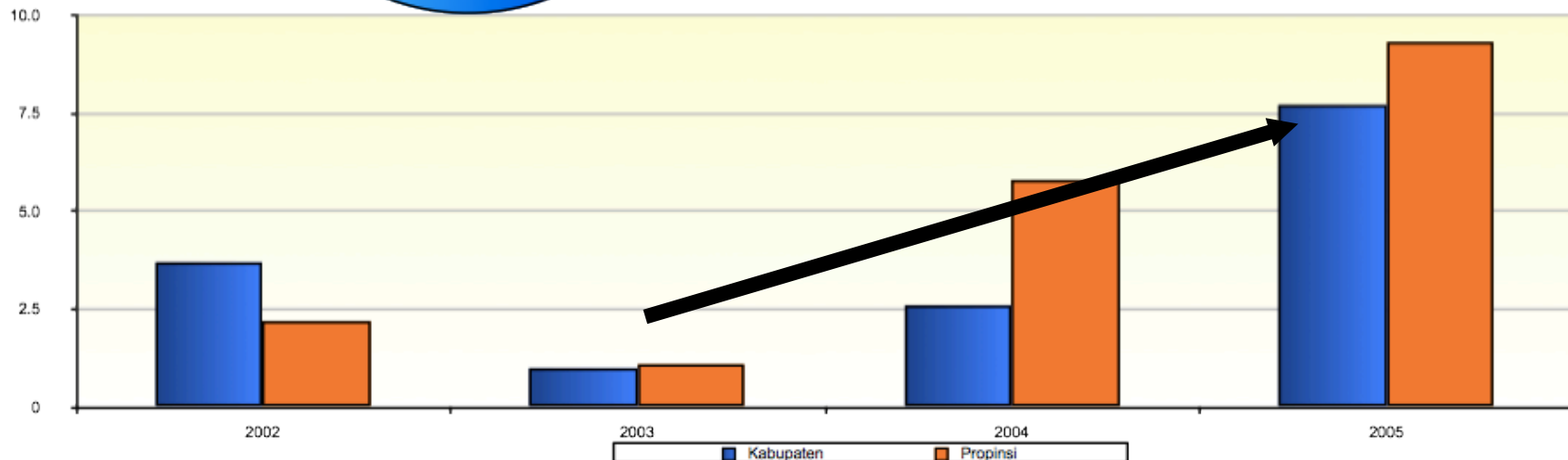
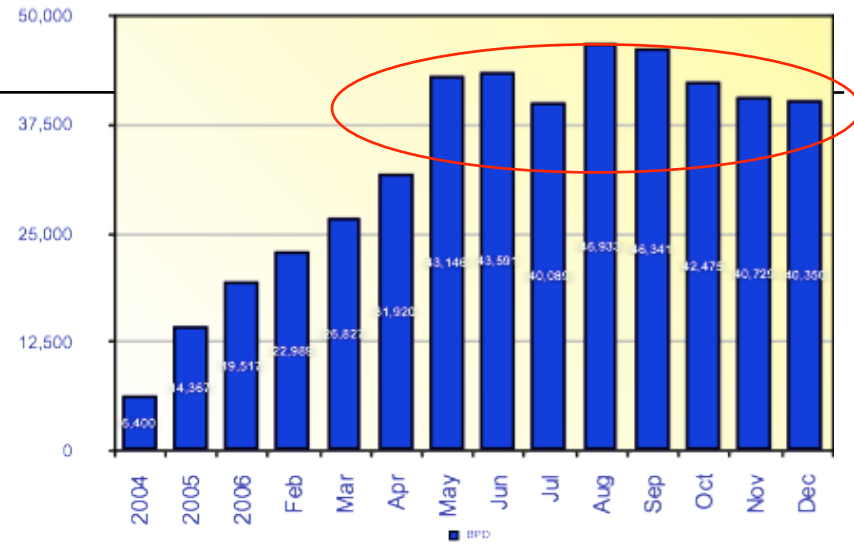
- **Presiden tidak senang** dengan prestasi serapan yang terendah dalam 3 tahun
 - (2009 : 91,8 %)
 - (2010 : 90,9 %)
 - (2011 : 87,0 %)
- Sebesar 270 Triliun terserap hanya di 1 bulan (Desember)
- Terlihat bahwa di Q1 birokrasi belum berbuat banyak selain administrasi gaji

Surplus dana APBD di Daerah lebih banyak masuk SBI, bukan untuk investasi...

Jumlah PDAM per Status Kredit



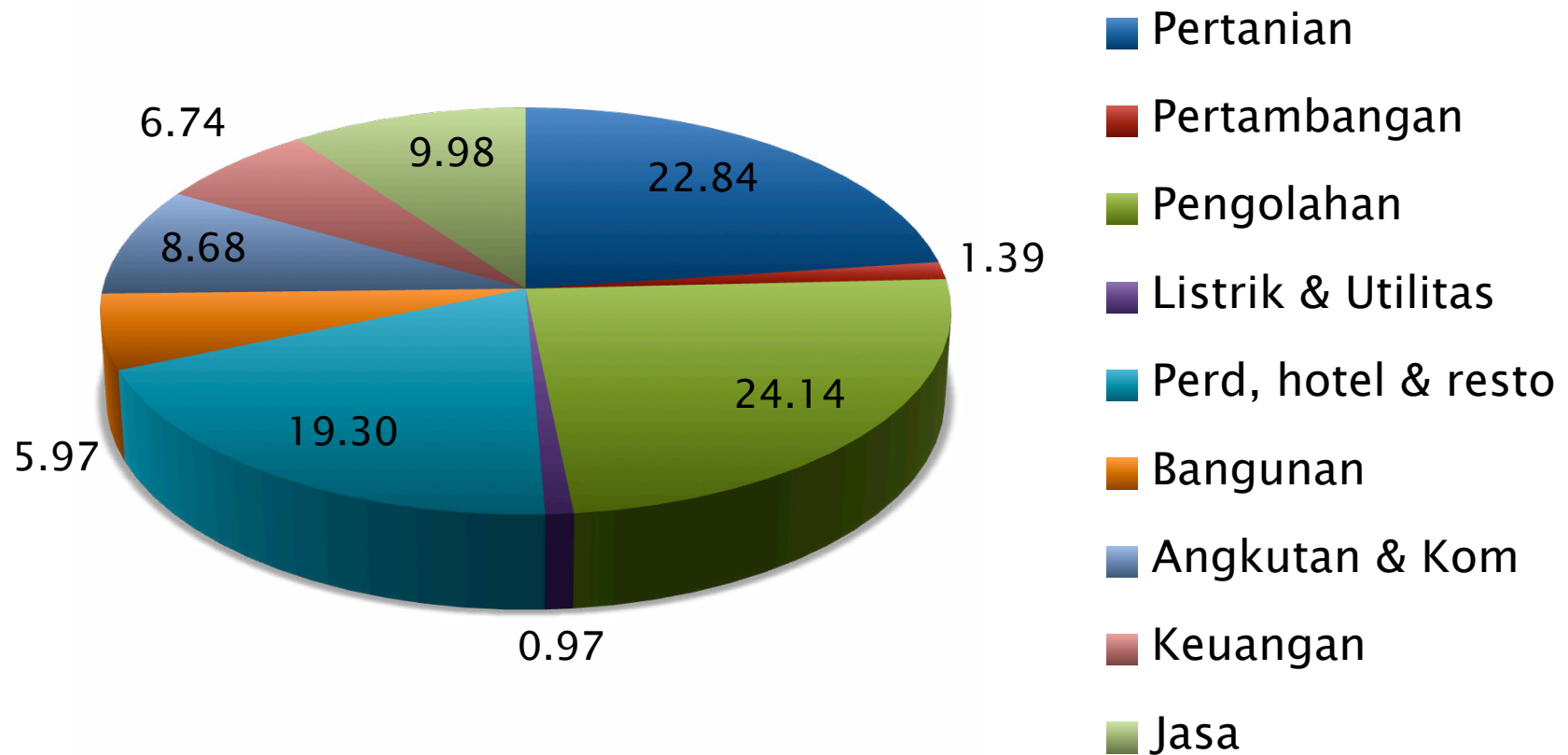
Nilai Pemilikan SBI 1 Bulan dari BPD



Apa Yang Diharapkan dari Pemda?

1. Penajaman prioritas belanja modal pada APBD
→ pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
2. Meningkatkan daya-serap anggaran untuk kepentingan pelayanan dasar.
3. Mendorong perumusan program yg langsung bermanfaat bagi rakyat (subsidi, pemberdayaan, peningkatan kemampuan wirausaha, dsb).
4. Meningkatkan kinerja SKPD di sektor-sektor pelayanan publik.

Penyumbang PDRB (%) Kab Deli Serdang, 2008



APBD Kab DS Per 29 Mei 2012

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		2,039,441	100.14
	Pendapatan Asli Daerah	380,055	18.66
	Dana Perimbangan	1,253,737	61.56
	Pajak Daerah	320,000	15.71
	Retribusi Daerah	42,654	2.09
	Lain-lain Pendapatan	6,701	0.33
Total Belanja		2,036,654	100.00
Belanja Tidak Langsung		1,019,126	50.04
	Belanja pegawai	946,932	46.49
	Hibah	2,985	0.15
	Bantuan sosial	15,654	0.77
	Bantuan keuangan	26,694	1.31
	Belanja tidak terduga	2,000	0.10
Belanja Langsung		1,017,528	49.96
	Belanja pegawai	216,197	10.62
	Belanja barang & jasa	386,172	18.96
	Belanja modal	415,159	20.38
Pembiayaan Daerah		(2,787)	-0.14
	SiLPA	7,500	0.37
	Pengeluaran	10,287	0.51
Surplus		2,787	0.14

Profil APBD Deli Serdang 2013

- Total APBD: Rp 2,39 triliun
- Belanja tak langsung: Rp 1,12 T (47%); belanja langsung: Rp 1,26 T (53%); surplus: Rp 7,2 miliar.
- Lima prioritas:
 1. Akses dan mutu pendidikan & kesehatan masyarakat
 2. Infrastruktur perkotaan dan perdesaan
 3. Pemb. pertanian berbasis lingkungan
 4. Investasi daerah dan penyerapan tenaga kerja
 5. Pelayanan publik & tata-kelola pemerintahan yg baik.

10 SKPD Dg Belanja Terbesar

1. Dinas Pekerjaan Umum
 2. Dinas Cipta Karya & Pertambangan
 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah-raga
 4. Dinas Kesehatan
 5. Sekretariat Daerah (Bgm dg Sekwan?)
 6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. RSUD Lubuk Pakam
 8. Dinas Pertanian
 9. Dinas Perikanan dan Kelautan
 10. Dinas Pasar
- ◆ Ada permintaan agar TAPD menyerahkan RKA dari SKPD dg belanja besar (ps.105, ay.3a Permendagri 59/2007). Apakah ini strategis bagi pengawasan oleh DPRD? Apakah bisa dipastikan bhw akses thd RKA akan menjamin pengawasan & akuntabilitas, tidak menjadi sumber kolusi?
 - ◆ Apakah ada kemajuan terkait dengan LHP yang sdh 4 TA selalu berstatus *disclaimer*?

Surplus / Defisit APBD

- ◆ APBD Kab DS Th. 2012 masih surplus (Rp 2,78 M). SILPA: Rp 7,5 M). Pembiayaan digunakan utk: Penyertaan modal (Rp 10,053 M) dan pembayaran pokok utang (Rp 235 jt). Bgm dg pembiayaan defisit?
- ◆ Menurut UU 17/2003, defisit APBN yg aman maksimal 3% dari PDB.
- ◆ Menurut PMK 137/2013 (pasal 2 ayat 1), defisit APBD ditetapkan sebesar 0,5% dari proyeksi PDB th 2013.
- ◆ Menurut pasal 3 ayat 1: Indikatif batas maksimal defisit adalah 6% dari perkiraan pendapatan daerah th 2013.
- ◆ PDB nasional: nominal: Rp 8.241,9 triliun, harga konstan 2000: Rp 2.618,1 triliun.
- ◆ PDRB kab Deli Serdang: Rp 25,19 triliun.
- ◆ Dengan perhitungan PAD th 2012 adl Rp 380,055 M, indikatif batas maksimal defisit APBD th 2013 adalah:
$$6\% \times \text{Rp } 380,055 \text{ M} = \text{Rp } 22,803 \text{ M}.$$

Dasar Persetujuan Ditjen PKPD thd Defisit APBD

- ▶ Batas maksimal kumulatif defisit APBD tidak terlampaui
- ▶ Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tidak terlampaui
- ▶ Laporan keuangan Pemda: WTP atau WDP
- ▶ Jmlh sisa pinjaman daerah ditambah jmlh pinjaman yg akan ditarik tidak lebih dari 75%
- ▶ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5

Pembiayaan Daerah

Defisit

Penerimaan Pembiayaan:

1. SILPA Tahun Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Surplus

Pengeluaran Pembiayaan:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman.

Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah (Lampiran PMK 137/2012)

No.	Uraian
6.1	Penerimaan APBD Tahun 2012
6.2	DAK APBD Tahun 2012
6.3	Dana Darurat APBD Tahun 2012
6.4	Dana pinjaman APBD Tahun 2012
6.5	Penerimaan Lain yang Kegunaannya Dibatasi pada APBD Tahun 2012
6.6	Penerimaan Umum APBD (angka 6.1 dikurangi jumlah angka 6.2 sampai dengan angka 6.5)
6.7	75% dari angka 6.6
6.8	<i>Outstanding</i> Pinjaman Lama (sesuai angka di Neraca)
6.9	Nilai Usulan Pinjaman Baru dan Obligasi
6.10	Total Pinjaman (angka 6.8 ditambah angka 6.9)

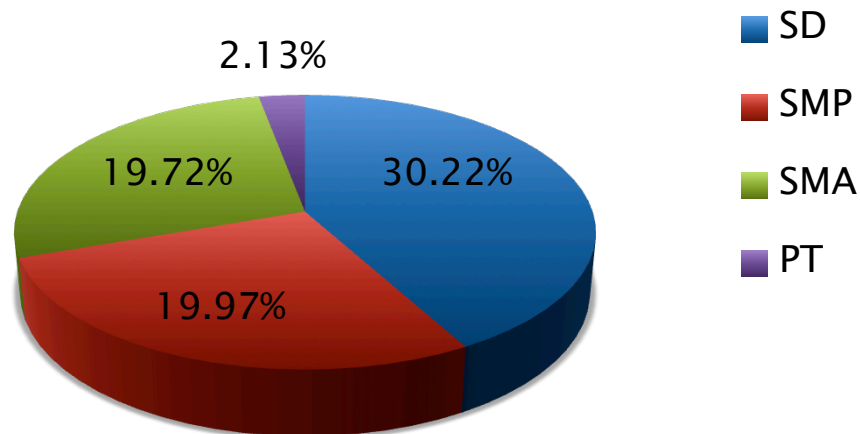
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})) - \text{BW}}{\text{P} + \text{B} + \text{BL}}$$

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DAU : Dana Alokasi Umum
 DBH : Dana Bagi Hasil
 DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
 BW : Belanja Pegawai
 P : Pokok Pinjaman
 B : Bunga Pinjaman
 BL : Biaya Lain-lain

Tantangan SDM Deli Serdang

Angkatan Kerja Pendidikan/Keterampilan Rendah



Data Pendidikan th 2008; Hasil dari program “Cerdas”?

	APK (%)	APM (%)
SD/MI	103,06	98,08
SMP/MTs	96,11	90,40
SMA/SMK/MA	81,37	75,81

Agenda Pembangunan Deli Serdang

- ◆ PDRB Kab DS th 2008 sebesar Rp 25,19 triliun. Pendapatan per kapita Rp 13,24 juta. Tumbuh 6,03 persen. Apakah ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan secara merata?
- ◆ Tingkat kemiskinan di Kab DS termasuk rendah (5,67%) dibanding rerata kabupaten lain di Sumut (13,59%), karena perkebunan tembakau. Tetapi, krn tembakau adl komoditas yg menurun, adakah alternatif agro-industri yg lain?
- ◆ Bandara Kuala Namu sebagai pusat pertumbuhan baru di Sumut. Apakah dpt dioperasikan awal th 2013 sesuai rencana? Bgm infrastruktur pendukungnya? Apakah manfaatnya bisa dioptimalkan oleh warga DS?

- ❑ Belanja modal yg meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah kebijakan yang harus diprioritaskan.
- ❑ Rakyat Deli Serdang menanti kontribusi anggaran publik yang nyata.

TERIMA KASIH